



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

DJKN

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG TASIKMALAYA**

**LAPORAN KEUANGAN
AUDITED
TAHUN 2024
PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**



**JALAN IR. H. JUANDA NOMOR 19
TASIKMALAYA
46151**

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tasikmalaya

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2024 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tasikmalaya, 07 Mei 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
THAMRIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	5
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	7
II. NERACA.....	8
III. LAPORAN OPERASIONAL	9
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	10
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	11
A. PENJELASAN UMUM.....	11
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	24
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	30
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	39
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	45
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	46

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel A.1	: Penggolongan Kualitas Piutang	19
Tabel A.2	: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	22
Tabel B.1	: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	25
Tabel B.2	: Perbandingan Realisasi Pendapatan s.d. 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2023	25
Tabel B.3	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2023	26
Tabel B.4	: Perbandingan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2023	26
Tabel B.5	: Perbandingan Belanja Pegawai s.d. 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2023	27
Tabel B.6	: Perbandingan Belanja Barang s.d. 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2023	27
Tabel B.7	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal s.d. 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2023	28
Tabel B.8	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2023	29
Tabel B.9	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	29
Tabel C.1	: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	31
Tabel C.2	: Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	31
Tabel C.3	: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	32
Tabel C.4	: Rincian Pendapatan yang Masih harus Diterima	32
Tabel C.5	: Rincian Persediaan	33
Tabel C.6	: Mutasi Nilai Tanah	33
Tabel C.7	: Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin	34
Tabel C.8	: Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan	34
Tabel C.9	: Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan	35
Tabel C.10	: Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya	35
Tabel C.11	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	36
Tabel C.12	: Mutasi Nilai Aset Lain-Lain	36
Tabel C.13	: Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	37
Tabel C.14	: Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	37
Tabel C.15	: Rincian Utang yang Belum Ditagihkan	38
Tabel C.16	: Rincian Pendapatan Diterima Dimuka	38
Tabel D.1	: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan TA 2023	39
Tabel D.2	: Rincian Beban Persediaan	41
Tabel D.3	: Rincian Beban Barang dan Jasa	41
Tabel D.4	: Rincian Beban Pemeliharaan	43
Tabel D.5	: Rincian Beban Perjalanan Dinas	43
Tabel D.6	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	44
Tabel D.7	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	45



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
TASIKMALAYA**

JALAN IR. H. JUANDA NOMOR 19, TASIKMALAYA 46151
TELEPON: (0265) 342636; FAKSIMILE: (0265) 342636

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2024 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2024 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tasikmalaya, 07 Mei 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

THAMRIN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2024 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.785.603.440 atau mencapai 236% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.447.751.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.488.887.835 atau mencapai 90% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.881.860.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.233.740.836, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp20.921.799, Aset Tetap (netto) sebesar Rp14.212.819.037, dan Aset Lainnya sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp32.182.360, dan Rp14.201.558.476.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.695.227.313, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.579.340.753, sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp3.116.047.560. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp85.338.000 dan sebesar Rp3.201.385.560,, sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp3.201.385.560.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp13.285.317.896 ditambah Surplus-LO sebesar Rp3.201.385.560 dan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp(4.048.125) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(2.281.096.855) sehingga kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp916.240.580. Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp14.201.558.476. Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar (Rp4.048.125) adalah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi berupa penghapusan barang yang masih memiliki manfaat.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024		% thd Angg	31 Desember 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.447.751.000	5.785.603.440	236%	2.943.963.455
JUMLAH PENDAPATAN		2.447.751.000	5.785.603.440	236%	2.943.963.455
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	2.345.318.000	2.116.146.284	90%	1.850.879.458
Belanja Modal	B.5	1.536.542.000	1.372.741.551	89%	131.087.000
JUMLAH BELANJA		3.881.860.000	3.488.887.835	90%	1.981.966.458

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	17.608.063	53.665.589
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.4	161.000	5.038.127
Persediaan	C.5	3.152.736	3.329.757
Jumlah Aset Lancar		20.921.799	62.033.473
ASET TETAP			
Tanah	C.5	8.975.545.000	8.975.545.000
Peralatan dan Mesin	C.6	4.201.772.991	3.659.344.905
Gedung dan Bangunan	C.7	5.669.286.551	4.877.245.000
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.8	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.9	11.800.000	11.800.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10	(4.645.585.505)	(4.237.141.773)
Jumlah Aset Tetap		14.212.819.037	13.286.793.132
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.11	14.016.444	523.436.279
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(14.016.444)	(519.388.154)
Jumlah Aset Lainnya		-	4.048.125
JUMLAH ASET		14.233.740.836	13.352.874.730
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13	32.182.360	67.556.834
Utang Yang belum Ditagihkan	C.14	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.15	-	-
Uang muka dari KPPN	C.16	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		32.182.360	67.556.834
EKUITAS			
Ekuitas	C.17	14.201.558.476	13.285.317.896
JUMLAH EKUITAS		14.201.558.476	13.285.317.896
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		14.233.740.836	13.352.874.730

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	5.695.227.313	2.815.251.584
JUMLAH PENDAPATAN		5.695.227.313	2.815.251.584
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	158.501.385	128.427.198
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.099.409.491	1.080.565.474
Beban Pemeliharaan	D.5	474.290.510	345.900.557
Beban Perjalanan Dinas	D.6	384.804.971	296.084.032
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	462.334.396	417.280.298
JUMLAH BEBAN		2.579.340.753	2.268.257.559
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		3.116.047.560	546.994.025
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	85.338.000	133.749.998
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Surplus/Defisit Dari Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		85.338.000	133.749.998
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		3.201.385.560	680.744.023
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.9	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		3.201.385.560	680.744.023

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1	13.285.317.896	13.441.000.260
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	3.201.385.560	680.744.023
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(4.048.125)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.5	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.6	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.7	(4.048.125)	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.8	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		(2.281.096.85)	(836.426.387)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		916.240.580	(155.682.364)
EKUITAS AKHIR	E.9	14.201.558.476	13.285.317.896

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana Strategis

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2012 tentang tentang Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang dan Lelang pada Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang.

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Informasi Akrual Pada Laporan Keuangan.
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
12. PMK No. 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK No. 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga.
13. PMK No. 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
14. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 29/MK.01/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SAKTI.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Entitas berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19 Tasikmalaya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya berkomitmen dengan visi

“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Tasikmalaya Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Tasikmalaya Tahun 2024 adalah 109,68 atau 18 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus merah. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Indeks
					Max. 120%
	Stakeholder Perspective(30%)				33.18%
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan				110.60%
1a-CP	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	175.87%	120.00%
1b-CP	Indeks integritas	P/L	20	20	103.67%
	Customer Perspective(20%)				23.49%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa				117.80%
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	P/L	71.50%	88.02%	120.00%

2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	P/L	86.50%	100.00%	115.61%
Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Indeks
					Maks 120%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal				120.00%
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	156.25%	120.00%
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	P/M	100%	126.69%	120.00%
4	Layanan Penilaian yang Agile. Efektif. dan Efisien				114.59%
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	P/M	75	85.94	114.59%
	Internal process (25%)				30.00%
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif				120.00%
5a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100%	122.34%	120.00%
5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	125.11%	120.00%
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif				120.00%
6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	P/M	77.00%	57.75%	120.00%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89.00%	120.00%	120.00%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional				120.00%
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	16,00%	0,78%	120.00%
	Learning & Growth Perspective (25%)				29.57%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				113.14%
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	90.00%	102.80%	114.22%
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	85.00	95.24	112.05%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				111.32%
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100%	120%	120.00%
9b-CP	Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	P/M	10%	0.00%	120.00%
10	Komunikasi publik yang efektif				120.00%
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	P/M	80	100	120.00%
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah				120.00%
11a-N	Indeks Efektivitas UKI	P/M	82.00	99.15	120.00%
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	P/M	100.00	120.00	120.00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					116.24%

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan *Audited* ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan bea lelang Pejabat Lelang Klas I dan bea lelang pegadaian diakui pada saat penetapan pemenang lelang.
 - Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara diakui pada saat diterbitkannya PJPN (Penetapan Jumlah Piutang Negara).
 - Pendapatan jasa lainnya yaitu pendapatan atas biaya Kutipan Risalah Lelang.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.1. Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan

menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan

kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrua sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrua. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrua pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi DIPA yang dilakukan selama periode pelaporan sebanyak sembilan kali.

*Realisasi
Pendapatan
Rp5.785.603.440*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar 5.785.603.440 atau mencapai 236% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.447.751.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya terdiri atas Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel B.1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2024		
	Target	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	4.664.000	85.338.000	1829,72%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.756.000	-	0,00%
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1.750.928.000	4.987.734.906	284,86%
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	689.214.000	700.260.273	101,60%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1.001.432	100%
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	1.189.000	11.268.829	947,76%
Jumlah	2.447.751.000	5.785.603.440	236,32%

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 96,49% dibandingkan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan pendapatan dari pendapatan bea lelang Pejabat Lelang Kelas I yang terealisasi melebihi target Tahun 2024 secara signifikan. Demikian juga dengan pendapatan selain bea lelang Pejabat Lelang Kelas I mengalami kenaikan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel B.2. Perbandingan Realisasi PendapatanTA 2024 danTA 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	4.987.734.906	2.036.951.938	144,86%
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	700.260.273	755.114.266	(7,26%)
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	11.268.829	15.078.742	(25,27)%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	85.338.000	133.749.998	(36,20)%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.001.432	3.068.511	(100,00)%
Jumlah	5.785.603.440	2.943.963.455	96,52%

*Realisasi Belanja
Negara
Rp3.488.887.835*

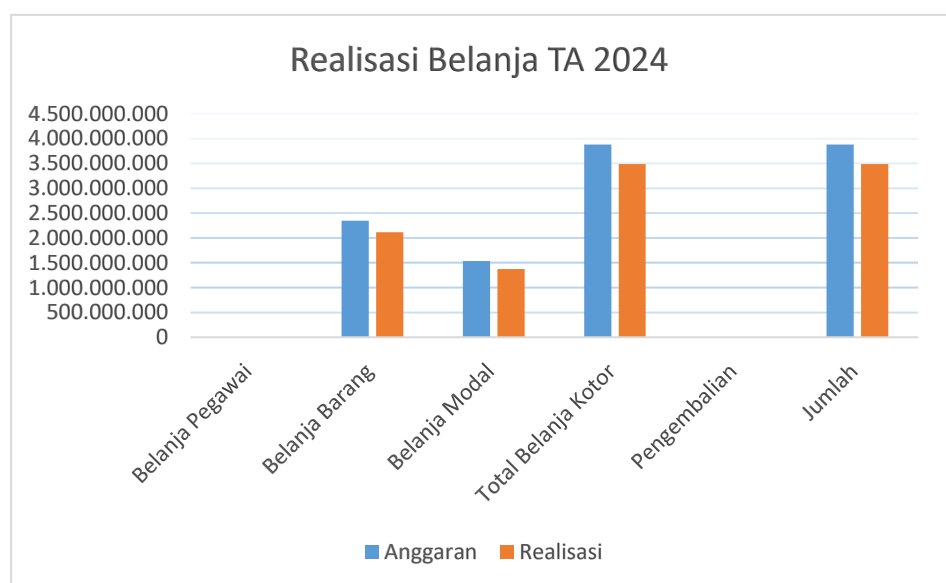
B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.488.887.835 atau 89,88% dari anggaran belanja sebesar Rp3.881.860.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel B.3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.345.318.000	2.116.146.284	90,23%
Belanja Modal	1.536.542.000	1.372.741.551	89,34%
Total Belanja Kotor	3.881.860.000	3.488.887.835	89,88%
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	3.881.860.000	3.488.887.835	89,88%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 44,83 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2023. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2024 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya adanya belanja modal yang pagunya lebih besar dari tahun 2023.

Tabel B.4. Perbandingan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	S.D. 31 Desember 2024	S.D. 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.116.146.284	1.850.879.458	3,99%
Belanja Modal	1.372.741.551	131.087.000	947,20%
Jumlah	3.488.887.835	1.981.966.458	76,03%

Belanja Pegawai Rp0 **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai periode s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tidak ada Realisasi belanja pegawai s.d. periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan Belanja pegawai sudah dilakukan secara terpusat di Kementerian Keuangan.

Tabel B.5. Perbandingan Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	S.D. 31 Desember 2024	S.D. 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Barang
Rp2.116.146.284**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang sampai dengan s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.116.146.284 dan Rp1.850.879.458. Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 14,33% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023.

Tabel B.6. Perbandingan Belanja s.d. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	S.D. 31 Desember 2024	S.D. 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	812.925.115	843.178.521	(3,59)%
Belanja Barang Non Operasional	121.009.260	64.521.060	87,55%
Belanja Barang Persediaan	158.324.364	128.292.630	23,41%
Belanja Jasa	164.792.064	172.902.658	(4,69)%
Belanja Pemeliharaan	474.290.510	345.900.557	37,12%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	385.742.971	296.084.032	30,28
Jumlah Belanja Kotor	2.117.084.284	1.850.879.458	14,38
Pengembalian Belanja	938.000	-	100%
Jumlah Belanja	2.116.146.284	1.850.879.458	14,33%

Belanja Modal**Rp1.372.741.551****B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.372.741.551 dan Rp131.087.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 947% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan terdapat penambahan belanja modal untuk penambahan nilai gedung dan bangunan di tahun 2024 yang menyebabkan kenaikan signifikan pada pagu belanja modal tahun 2024.

Tabel B.7. Perbandingan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2024 dan s.d. 31 Desember 2023

URAIAN	S.D. 31 Desember 2024	S.D. 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	580.700.000	131.087.000	342,99%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	792.041.551	-	100%
Jumlah Belanja Kotor	1.372.741.551	131.087.000	947%
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.372.741.551	131.087.000	947%

B.5.1 Belanja Modal Peralatan Fasilitas Perkantoran

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp580.700.000 dan Rp131.087.000, mengalami kenaikan sebesar 342,99% bila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 karena adanya kenaikan pagu belanja modal peralatan dan mesin di tahun 2024.

Tabel B.8. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2024 dan s.d. 31 Desember 2023

URAIAN	S.D. 31 Desember 2024	S.D. 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Locker	-	16.050.000	(100%)
Meja Kerja Eselon 4	-	21.090.000	(100%)
Meja Kerja	-	75.000.000	(100%)
Meja Kerja Eselon 3	-	8.547.000	(100%)
Kursi Kerja	45.700.000	-	100%
Meja Rapat	24.000.000	-	100%
AC Split 2 PK	66.150.000	-	100%
CCTV	14.150.000	-	100%
Brankas	10.000.000	-	100%
Sice	13.500.000	-	100%
Panel ATS Genset	43.000.000	-	100%
Jumlah Belanja	216.500.000	120.687.000	79,39%

B.5.2 Belanja Modal Kendaraan Bermotor

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp364.200.000 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 100% bila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023, karena pada tahun 2024 KPKNL Tasikmalaya mendapat alokasi pagu untuk belanja kendaraan bermotor sedangkan pada tahun 2023 tidak mendapat alokasi.

Tabel B.8.a. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Kendaraan Bermotor s.d. 31 Desember 2024 dan s.d. 31 Desember 2023

URAIAN	S.D. 31 Desember 2024	S.D. 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	43.200.000	-	100%
Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	321.000.000	-	100%
Jumlah Belanja	364.200.000	-	100%

B.5.3 Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2024 adalah dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp112.140.000, mengalami penurunan sebesar 100%

karena pada tahun 2024 tidak ada alokasi untuk belanja modal perangkat pengolahan data.

Tabel B.8.b Perbandingan Realisasi Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi s.d. dan s.d. 31 Desember 2023

URAIAN	S.D. 31 Desember 2024	S.D. 31 Desember 2023	%
Printer	-	10.400.000	(100,00%)
Jumlah Belanja	-	10.400.000	(100,00%)

B.5.4 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp792.041.551 dan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0. Tahun 2024 KPKNL Tasikmalaya menerima pagu anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan berupa Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan.

Tabel B.9. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan BangunanTA 2024 danTA 2023

URAIAN	S.D. 31 Desember 2024	S.D. 31 Desember 2023	%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp792.041.551	-	100,00%
Jumlah Belanja Kotor	Rp792.041.551	-	100,00%
Jumlah Belanja	Rp792.041.551	-	100,00%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel C.1. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Uang Tunai	-	-
Uang di Rekening Bank	-	-
Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	-	-
Pembulatan	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel C.2. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Uang Tunai	-	-
Bank BRI Rek. No : 010001000618302	-	-
Bank BRI Rek No : 010001000286309	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp17.608.063*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp17.608.063 dan Rp53.665.589 Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara Penerimaan yang berasal dari Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke pihak yang berhak dan Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal pelaporan Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.3. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Uang Jaminan Lelang yang belum diambil	5.435.837	51.300.000
Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	3.836.226	2.365.589
Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	8.336.000	-
Jumlah	17.608.063	53.665.589

C.4 Pendapatan yang Masih harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima Rp161.000

Saldo Pendapatan yang masih harus diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp161.000 dan Rp5.038.127. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan dari kinerja yang sudah dilaksanakan sampai dengan periode laporan, namun pendapatan tersebut belum diterima sehingga sampai dengan akhir periode laporan Pendapatan tersebut belum dapat disetorkan oleh Bendahara Penerimaan.

Rincian sumber Pendapatan yang masih harus diterima pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.4. Rincian Pendapatan yang masih harus diterima

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan yang masih harus diterima	161.000	5.038.127
Jumlah	161.000	5.038.127

Persediaan Rp3.152.736

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.152.736 dan Rp3.329.757. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.5. Rincian Persediaan

Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	3.152.736	3.329.757
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	3.152.736	3.329.757

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp8.975.545.000

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.975.545.000 dan Rp8.975.545.000.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.6. Mutasi Nilai Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	8,975,545,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	-
Saldo per 31 Desember 2024	8.975.545.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel C.6.a Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	800 m2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.870.800.000
2	572 m2	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.337.622.000
3	2053 m2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.767.123.000
Jumlah			8.975.545.000

C.7 Peralatan dan Mesin**Peralatan dan Mesin**

Rp4.201.772.991

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp4.201.772.991 dan Rp3.659.344.905. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.7. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	3.659.344.905
Mutasi tambah:	598.550.000
Pembelian	580.700.000
Transfer masuk	17.850.000
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	-
Lain-Lain	-
Penghentian dari penggunaan	56.121.914
Saldo per 31 Desember 2024	4.214.894.905
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(3.362.822.898)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	838.950.093

Rincian aset peralatan dan mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp5.669.286.551*

C.8 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp5.669.286.551 dan Rp4.872.245.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.8. Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	4.877.245.000
Mutasi tambah:	
Reklas Aset	792.041.551
Mutasi kurang:	
Revaluasi BMN	-
Koreksi Pencatatan Nilai	-
Saldo per 31 Desember 2024	5.669.286.551
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(1.271.762.607)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	4.397.523.944

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0*

C.9 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi tambah atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan mutasi kurang adalah sebesar Rp0.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel C.9. Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Barang berlebih hasil temuan revaluasi	-
Mutasi kurang:	
Reklas Aset	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp11.800.000

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp11.800.000 dan Rp11.800.000. Aset tetap tersebut berupa alat musik dan Lukisan Cat Minyak. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap lainnya untuk periode 31 Desember 2024.

Mutasi atas aset tetap ini untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024, yaitu :

Tabel C.10. Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	11,800,000
Mutasi tambah:	
Penambahan Jaringan	-
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2024	11.800.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(11.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	800.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp4.659.601.949)

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing (Rp4.659.601.949) dan (Rp4.237.141.773). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel C.11. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	8.975.545.000	-	8.975.545.000
2	Peralatan dan Mesin	4.214.894.905	(3.362.822.898)	838.950.093
3	Gedung dan Bangunan	4.877.245.000	(1.271.762.607)	4.397.523.944
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	11.800.000	11.000.000	800.000
Akumulasi Penyusutan		17.952.588.587	4.659.601.949	14.212.819.037

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lain-Lain
Rp14.016.444

C.12 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp14.016.444 dan Rp523.436.279. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel C.12. Mutasi Nilai Aset Lain-Lain

Saldo per 31 Desember 2023	523.436.279
Mutasi tambah:	
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi	28.360.914
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan (BMN yang dihentikan)	(537.780.749)
Saldo per 31 Desember 2024	14.016.44
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	(14.016.44)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp14.016.444)

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing (Rp14.016.444) dan (Rp11.800.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan

pengakumulasian atas Transaksi Antar Entitas sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel C.13. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	14.016.444	14.016.444	-
Jumlah	14.016.444	14.016.444	-

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp33.286.985

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp33.286.985 dan Rp67.556.834. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.14. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Penerimaan	17.608.063	Utang Jaminan Lelang yang belum diambil dan Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi
Belanja Langganan Listrik	10.203.753	Pemakaian listrik bulan Desember 2024
Belanja Langganan Telepon	3.224.544	Pemakaian Telepon bulan Desember 2024
Belanja Langganan Air	1.146.000	Pemakaian Air bulan Desember 2024
Total	33.182.360	

Utang yang Belum
Ditagihkan
Rp0

C.15 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak lain dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Utang yang belum ditagihkan pada KPKNL Tasikmalaya berupa kuitansi UP yang belum di-SPM-kan per 31 Desember 2024.

Adapun rincian Utang yang Belum Ditagihkan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.15. Rincian Utang yang Belum Ditagihkan

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang yang belum ditagihkan	-	kuitansi UP yang belum di-SPM-kan per 31 Desember 2024
Total	-	

*Pendapatan Diterima
Dimuka Rp0*

C.16 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima di Kas Negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Negara tersebut. Adapun rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.16. Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Total	-	

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.17 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas**Rp14.201.558.476****C.19 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14.201.558.476 dan Rp13.285.317.896. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional, Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan PNBP**Rp5.780.726.313****D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.780.726.313 dan Rp827.975.127. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel D.1. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak S.D. 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	4.982.857.779	2.041.990.065	144,26%
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	700.260.273	755.114.266	(7,26%)
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	11.268.829	15.078.742	(25,27%)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	3.068.511	(100%)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	85.338.000	-	100%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.001.432	-	100%
Jumlah	5.780.726.313	2.815.251.584	

Pendapatan dari dan Pengelolaan Keuangan berasal dari biaya pengurusan piutang negara, bea lelang atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Tasikmalaya dan bea lelang pegadaian.

Terdapat selisih sebesar Rp4.877.127 antara nilai pendapatan PNBPN pada Laporan Operasional (basis akrual) dibandingkan dengan nilai realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (basis kas).

Pendapatan Bea Lelang Kelas I pada Laporan Operasional sebesar Rp4.982.857.779 dan sebesar Rp4.987.734.906 pada Laporan Realisasi Anggaran. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian atas pendapatan negara bukan pajak yang diakui secara akrual pada awal dan akhir tahun 2024 sebagai penambah/pengurang nilai pada Laporan Operasional atas pendapatan PNBPN Pejabat Lelang Kelas I pada akhir tahun 2024.

Penyesuaian pengakuan pendapatan dilakukan atas transaksi lelang yang telah dilakukan pada akhir 2023 namun pelunasannya baru dilaksanakan pada awal Januari 2024 dan pelaksanaan lelang pada akhir tahun 2024 namun pelunasannya baru dilaksanakan pada awal Januari 2025. Rincian atas selisih pendapatan sebagai berikut:

Tabel D.1.a. Rincian Selisih Pendapatan Negara Bukan Pajak LO-LRA

No.	Uraian	Nilai
Penyesuaian pada awal tahun 2024		
1.	Bea lelang PL I atas lelang yang dilakukan tahun akhir tahun 2023 namun PNBPN-nya baru disetorkan pada awal 2025-tercatat sebagai pendapatan 2024 pada basis kas.	(5.038.217)
Penyesuaian pada akhir tahun 2024		
2.	Bea lelang PL I atas lelang yang dilakukan tahun akhir tahun 2024 namun PNBPN-nya baru disetorkan pada awal 2025-tercatat sebagai penambah pendapatan 2024 pada basis akrual	161.000
Selisih Pendapatan pada LO-LRA		(4.877.127)

*Beban Persediaan
Rp158.501.385*

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp158.501.385

dan Rp128.427.198. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan disajikan dalam tabel berikut:

*Tabel D.2. Rincian Beban Persediaan
S.D. 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	S.D. 31 Desember 2024	S.D. 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan konsumsi	158.501.385	128.427.198	23,42%
Jumlah	158.501.385	128.427.198	23,42%

Nilai beban persediaan pada Laporan Operasional (basis akrual) tidak sama dengan nilai realisasi belanja persediaan konsumsi pada Laporan Realisasi Anggaran (basis kas) yaitu sebesar Rp158.324.364, hal ini disebabkan terdapat perbedaan pengertian persediaan konsumsi pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran. Beban persediaan konsumsi pada Laporan Operasional merupakan **nilai pemakaian** barang persediaan sampai dengan akhir tahun 2024 sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran merupakan **nilai dari belanja** barang persediaan sampai dengan akhir tahun 2024.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp1.099.409.491*

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.099.409.491 dan Rp1.080.565.474. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan dalam tabel berikut:

*Tabel D.3. Rincian Beban Barang dan Jasa
S.D. 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	S.D. 31 DESEMBER 2024	S.D. 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	673.724.249	580.377.755	16,08%

Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	35.244.996	23.626.617	49,17%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18.533.870	17.714.000	4,63%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	74.112.000	167.016.000	55,63%
Beban Barang Operasional Lainnya	11.310.000	52.040.800	(78,27%)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	2.403.349	(100%)
Beban Bahan	56.457.800	23.915.560	136,07%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	64.551.460	40.605.500	58,97%
Beban Langganan Listrik	125.539.656	131.845.986	(4,34%)
Beban Langganan Telepon	23.279.572	26.669.157	(5,72%)
Beban Langganan Air	13.762.950	8.950.750	51,06%
Beban Jasa Profesi	0	5.400.000	(100%)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2.892.938	0	100%
Jumlah Belanja	Rp1.099.409.491	1.080.565.474	1,74%

Nilai beban barang dan jasa pada Laporan Operasional (basis akrual) terdapat selisih sebesar Rp683.052 dengan nilai realisasi belanja barang operasional/non operasional dan jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (basis kas) yaitu sebesar Rp1.098.726.439, hal ini disebabkan karena terdapat penyesuaian atas belanja barang dan jasa yang diakui secara akrual di akhir tahun 2024 sebagai penambah nilai di laporan Operasional sebesar Rp13.428.297 dan penyesuaian di awal tahun 2024 sebagai pengurang nilai di Laporan Operasional sebesar Rp13.891.245, sebagai berikut:

Tabel D.3.a. Rincian Selisih Beban Barang dan Jasa LO-LRA

No.	Uraian	Nilai
Penyesuaian pada awal tahun 2024		(13.891.245)
1.	Tagihan Listrik Desember 2023	(10.790.498)
2.	Tagihan Telepon Desember 2023	(2.196.497)
3.	Tagihan Air Desember 2023	(904.250)
Penyesuaian pada akhir tahun 2024		14.574.297
1.	Tagihan Listrik Desember 2024	10.203.753
2.	Tagihan Telepon Desember 2024	331.606
3.	Tagihan Air Desember 2024	1.146.000
4.	Tagihan Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2.892.938
Selisih Beban Barang dan Jasa pada LO-LRA		683.052

Beban Pemeliharaan

Rp474.290.510

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp474.290.510 dan Rp232.258.704. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan disajikan dalam tabel berikut:

*Tabel D.4. Rincian Beban Pemeliharaan
S.D. 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2023*

URAIAN	S.D. DESEMBER 2024	S.D. DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	254.582.632	133.550.456	90,63%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	219.707.878	212.350.101	3,46%
Jumlah Belanja	474.290.510	345.900.557	37,12%

Nilai beban pemeliharaan pada Laporan Operasional (basis akrual) sama dengan nilai realisasi belanja pemeliharaan pada Laporan realisasi Anggaran (basis kas) yaitu sebesar Rp474.290.510, hal ini disebabkan karena tidak terdapat penyesuaian atas belanja pemeliharaan yang diakui secara akrual di awal dan di akhir tahun 2024.

Beban Perjalanan

Dinas

Rp384.804.971

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp384.804.971 dan Rp296.084.032. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan dalam tabel berikut:

*Tabel D.5. Rincian Beban Perjalanan Dinas
S.D. 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	S.D. DESEMBER 2024	S.D. DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	347.849.971	270.149.032	28,76%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.955.000	25.935.000	42,49%
Jumlah Belanja	384.804.971	296.084.032	29,96%

Nilai beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (basis akrual) sama dengan nilai realisasi belanja pemeliharaan pada Laporan realisasi Anggaran (basis kas) yaitu sebesar

Rp474.290.510, hal ini disebabkan karena tidak terdapat penyesuaian atas belanja pemeliharaan yang diakui secara akrual di awal dan di akhir tahun 2024.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp462.334.396

D.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp462.334.396 dan Rp417.280.298. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel D.6. Rincian Penyusutan dan Amortisasi S.D. 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2023

URAIAN	S.D. DESEMBER 2023	S.D. DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	184.736.483	243.732.912	(24,21%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	277.597.913	172.198.011	61,21%
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional	-	1.349.375	(100%)
Jumlah Belanja	462.334.396	221.069.006	109,14%

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp133.749.998

D.7 Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp85.338.000 dan Rp133.749.998.

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pendapatan Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 adalah Pelepasan Aset Non Lancar.

Tabel D.7. Rincian Kegiatan Non Operasional
S.D. 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2023

URAIAN	S.D. 31 Desember 2024	S.D. 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	85.338.000	133.749.998	(36,20%)
Jumlah	85.338.000	133.749.998	(36,20%)

Pos Luar Biasa Rp0

D.8 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas satuan kerja adalah kekayaan bersih satuan kerja yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban kementerian pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Ekuitas Awal

Rp13.285.317.896

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13.285.317.896 dan Rp13.441.000.260.

Surplus/Defisit LO

Rp3.201.385.560

E.2 Surplus /Defisit LO

Jumlah Surplus / Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.201.385.560 dan Rp680.744.023. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
(Rp4.048.125)*

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas berupa koreksi nilai aset non revaluasi periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp4.048.125) dan Rp0. Nilai Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada Tahun 2024 ini adalah koreksi nilai aset aset non revaluasi berupa penghapusan barang yang masih memiliki masa manfaat.

*Transaksi Antar
Entitas
(Rp2.281.096.855)*

E.4 Transaksi Antar Entitas Aset

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp2.281.096.855) dan (Rp836.426.387)

*Ekuitas Akhir
Rp14.201.558.476*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14.201.558.476 dan Rp13.285.317.896.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Sesuai hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa BPK RI, tidak ada rekomendasi koreksi transaksi atas Laporan Keuangan Tahun 2024 yang telah disusun oleh satker KPKNL Tasikmalaya.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak terdapat pengungkapan lain-lain dalam laporan keuangan ini.

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Realisasi Pendapatan
3. Laporan Realisasi Belanja
4. Laporan Neraca
5. Laporan Neraca Percobaan Akrua
6. Laporan Neraca Percobaan Kas
7. Laporan Operasional
8. Laporan Perubahan Ekuitas
9. Laporan BMN Gabungan
10. Laporan BMN Intrakomptabel
11. Laporan BMN Ekstrakomptabel
12. Laporan Penyusutan BMN Intrakomptabel
13. Laporan Penyusutan BMN Ekstrakomptabel
14. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
15. Laporan Posisi BMN di Neraca
16. Laporan Persediaan
17. Laporan CRBMN Kuasa Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
18. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
19. Laporan Saldo Kas Bendahara Penerimaan
20. Rekening Koran Lelang Bendahara Penerimaan
21. Rekening Koran Piutang Negara Bendahara Penerimaan
22. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
23. Rekening Koran Rekening Virtual Bendahara Pengeluaran
24. Rekening Koran Rekening Penampungan Tukin Bendahara Pengeluaran
25. Berita Acara Stock opname Persediaan
26. Berita Acara Rekonsiliasi PNBP Bea Lelang
27. Berita Acara Rekonsiliasi PNBP Biad Piutang Negara
28. Memo Penyesuaian
29. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan